

Pengaruh PDRB Per Kapita, Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat

Dea Fahera¹, Mike Triani²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia.

*Korespondensi: deafahera2002@gmail.com, miketriani@fe.unp.ac.id

Info Artikel

Diterima:

30 Oktober 2025

Disetujui:

1 November 2025

Terbit daring:

2 November 2025

DOI: -

Sitasi:

Fahera, D. & Triani, M. (2025). Pengaruh PDRB Per Kapita, Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat.

Abstract:

This study aims to analyze the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita, poverty rate, and government expenditure on the Human Development Index (HDI) in West Sumatra Province. The study employs panel data from 12 regencies and 7 cities over the period 2020–2024. The analytical method used is panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) approach. The results indicate that GRDP per capita has a positive and significant effect on HDI, the poverty rate has a negative but insignificant effect on HDI, while government expenditure has a positive and significant effect on HDI. Simultaneously, the three variables significantly influence HDI in West Sumatra. These findings emphasize the importance of increasing community income and enhancing the effectiveness of regional budget management to support human development, as well as the need for strategic policies to mitigate the impact of poverty.

Keywords: GRDP per capita, Poverty Rate, Governments Expenditure, Human Development Index

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tingkat kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan data panel dari 12 kabupaten dan 7 kota selama periode 2020–2024. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, tingkat kemiskinan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap IPM, sementara pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap IPM di Sumatera Barat. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan pendapatan masyarakat dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah dalam mendukung pembangunan manusia, serta perlunya kebijakan strategis untuk menekan dampak kemiskinan.

Kata Kunci: PDRB per kapita, Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia

Kode Klasifikasi JEL: O15, I32, H53

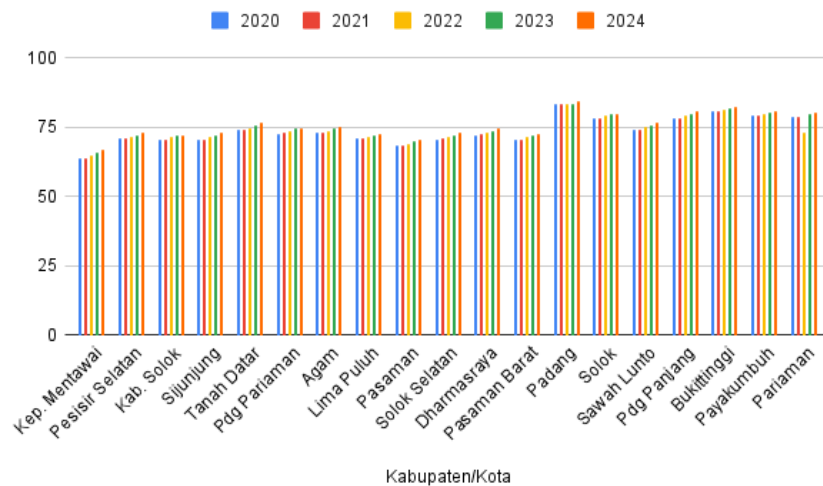
PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembangunan, seperti rendahnya mutu pendidikan, tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta keterbatasan daya saing sumber daya manusia. Menurut Nuraini et al. (2023), pembangunan manusia memposisikan manusia sebagai subjek utama sekaligus tujuan akhir dari pembangunan, bukan sekadar alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya.

Salah satu indikator penting untuk mengukur kualitas pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur capaian rata-rata dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak (BPS, 2015). Oleh karena itu, IPM tidak hanya mencerminkan aspek ekonomi, tetapi juga menilai dimensi sosial yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Rahayu et al., 2022).

Secara nasional, IPM Indonesia menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, nilai IPM Indonesia mencapai 75,02, naik dari 74,39 pada tahun sebelumnya (BPS, 2023). Capaian ini menempatkan Indonesia dalam kategori tinggi, namun masih menyisakan kesenjangan pembangunan manusia yang cukup besar antarwilayah.

Di tingkat daerah, Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu provinsi dengan capaian IPM yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera. Pada tahun 2024, IPM Sumatera Barat mencapai 76,43 dan menempati posisi kedua tertinggi di kawasan tersebut. Meskipun demikian, perbedaan antarwilayah di provinsi ini masih terlihat signifikan. Kota Padang mencatat IPM tertinggi sebesar 84,38, sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya mencapai 66,67. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan memiliki keunggulan dalam hal infrastruktur pendidikan, layanan kesehatan, dan akses ekonomi. Sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi, Kota Padang turut berkontribusi besar terhadap tingginya IPM melalui penyediaan fasilitas dasar yang lebih baik (Nasution et al., 2025). Perbedaan ini menegaskan masih adanya ketimpangan pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Grafik 1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota 2020-2024

Salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan IPM adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, yang mencerminkan rata-rata pendapatan masyarakat. Peningkatan PDRB per kapita biasanya memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup melalui akses pendidikan, layanan kesehatan, serta standar hidup yang layak. Namun, pertumbuhan ekonomi belum tentu berdampak langsung terhadap pembangunan manusia apabila distribusi pendapatan tidak merata (Todaro & Smith, 2020).

Selain itu, tingkat kemiskinan juga merupakan faktor yang memiliki pengaruh penting terhadap IPM. Tingginya tingkat kemiskinan menghambat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, sehingga berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini secara langsung memengaruhi capaian dimensi pendidikan dan kesehatan (Todaro & Smith, 2021; Ravallion, 2020). Di Sumatera Barat, meskipun angka kemiskinan menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, ketimpangan antarwilayah masih cukup mencolok.

Faktor lainnya adalah pengeluaran pemerintah, yang berperan besar dalam mendukung pembangunan manusia karena berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk menyediakan barang dan jasa publik. Pengeluaran pemerintah yang diarahkan secara efektif pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebaliknya, jika alokasi anggarannya tidak tepat sasaran, dampak pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia menjadi kurang optimal (Musgrave & Musgrave, 2020; Suparmoko, 2020).

Dalam kerangka teori pembangunan manusia, *Capability Approach* yang dikembangkan oleh Amartya Sen menekankan bahwa pembangunan harus diarahkan untuk memperluas kemampuan dasar manusia dalam menjalani kehidupan yang dianggap bernilai (Sen, 1999). Pendekatan ini menjadi dasar konseptual dalam pengukuran IPM oleh UNDP dan BPS, karena pembangunan manusia tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesempatan dan pilihan hidup masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu memperlihatkan adanya hubungan antara faktor ekonomi dan sosial dengan tingkat pembangunan manusia. Penelitian Jesika et al. (2024) menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di provinsi-provinsi Sumatera. Sementara itu, Simarmata dan Iskandar (2022) menemukan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM, dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap IPM di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan manusia di Sumatera Barat. Kesenjangan PDRB per kapita antarwilayah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata. Meskipun tingkat kemiskinan mengalami penurunan, ketimpangan antar kabupaten/kota masih menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan manusia. Selain itu, peningkatan pengeluaran pemerintah belum selalu diikuti oleh peningkatan IPM apabila alokasinya tidak fokus pada sektor produktif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan manusia yang lebih inklusif dan merata di seluruh wilayah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan dari sumber lain atau hasil publikasi lembaga terkait. Data

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data panel, yang merupakan gabungan antara data *time series* (tahun 2020–2024) dan *cross-section* (19 kabupaten/kota di Sumatera Barat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya berbentuk angka dan diolah menggunakan metode statistik (Hardani et al., 2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh variabel ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1 Definisi Operasional

No	Variabel Penelitian	Definisi Variabel	Indikator Pengukuran
1	Indeks Pembangunan Manusia	Total indeks IPM tahunan	Indeks Poin
2	PDRB Per Kapita	Produk Domestik Regional Bruto per kapita Atas Harga Konstan 2010	Juta Rupiah
3	Tingkat Kemiskinan	Persentase jumlah penduduk miskin yang di bawah garis kemiskinan	Persen
4	Pengeluaran Pemerintah	Total realisasi pengeluaran daerah yang mencakup seluruh belanja daerah	Miliar Rupiah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif, dengan data yang diolah dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat. Data diperoleh dari BPS serta DJPK dan dianalisis menggunakan metode regresi data panel, yang merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross-section*.

1. Pemilihan Model Penelitian

a. Uji Chow

Tabel 2 Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	359.486753	(18,73)	0.000
Cross-section Chi-square	427.101760	18	0.000

Sumber : Data diolah Eviews 13, 2025

Hasil uji Chow menunjukkan nilai *Prob F* sebesar $0,0000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, model yang paling sesuai digunakan adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

b. Uji Hausman

Tabel 3 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi.Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	28.388719	3	0.000

Sumber : Data diolah Eviews 13, 2025

Selanjutnya, hasil uji Hausman juga menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$. Dengan demikian, model yang dipilih tetap *Fixed Effect Model (FEM)*, sehingga tidak perlu dilakukan uji *Lagrange Multiplier*.

2. Estimasi Model Regresi Fixed Effect

Model yang dipilih menghasilkan estimasi seperti disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4 Hasil Uji Fixed Effect Model

Variabel	Coefficient	t-statistic	Prob
C	-438.8129	-19.07521	0.0000
Log_PDRB Per Kapita (X1)	19.81335	24.05855	0.0000
Tingkat Kemiskinan (x2)	-0.064547	-0.0627465	0.5323
Log_Pengeluaran Pemerintah (X3)	1.237689	3.419160	0.0010
R-Squared		0.997578	
Adjusted R-Squared		0.996881	
F-statistic		1431.647	
Prob (F-statistic)		0.000000	

Sumber : Data diolah Eviews 13, 2025

Berdasarkan hasil estimasi dengan model FEM, diperoleh nilai konstanta sebesar -438.8129. Artinya, jika seluruh variabel independen bernilai konstan (nol), maka rata-rata IPM bernilai -438.8129. Variabel PDRB per kapita memiliki koefisien positif sebesar 19.81335, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% PDRB per kapita dapat meningkatkan IPM sebesar 19.81335 poin dengan asumsi variabel lain tetap. Sementara itu, tingkat kemiskinan memiliki koefisien negatif sebesar -0.064547, menandakan bahwa setiap kenaikan 1% pada tingkat kemiskinan dapat menurunkan IPM sebesar 0.064547 poin. Variabel pengeluaran pemerintah menunjukkan koefisien positif sebesar 1.237689, yang berarti peningkatan 1% pada pengeluaran pemerintah akan menaikkan IPM sebesar 1.237689 poin, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian digunakan untuk memastikan hasil yang diperoleh akurat, linier, tidak bias/berkriteria BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) dalam analisis *Ordinary Least Squares* (OLS). Model yang dipakai yaitu *Fixed Effect Model* (FEM), sehingga uji yang harus dilaksanakan yakni Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas (Basuki & Prawoto, 2017).

a. Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Uji Multikolinearitas

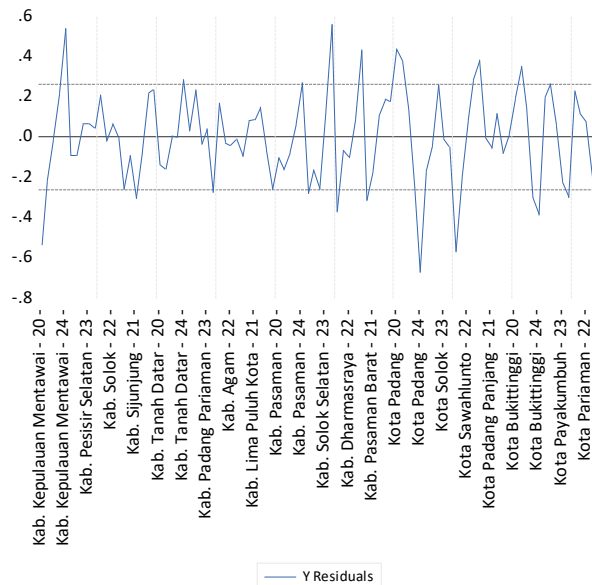
	Log_PDRB Per Kapita (X1)	Tingkat Kemiskinan (X2)	Log_Pengeluaran Pemerintah (X3)
Log_PDRB Per Kapita (X1)	1.000000	-0.399611	-0.377647
Tingkat Kemiskinan (X2)	-0.399611	1.000000	0.221777
Log_Pengeluaran Pemerintah (X3)	-0.377647	0.221777	1.000000

Sumber : Data diolah Eviews 13, 2025

Tabel 5 terdapat nilai koefisien korelasi X1 dan X2 sebesar $-0.399611 < 0,85$, X1 dan X3 sebesar $-0.377647 < 0,85$, dan X2 dan X3 sebesar $0.221777 < 0,85$. Sehingga penelitian terbebas masalah multikolinieritas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah varian residual konstan atau tidak. Dimana seluruh residual maupun error pada pengamatan harus memiliki varian yang sama disebut dengan homoskedastisitas. Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah Eviews 13, 2025

Berdasarkan hasil uji menggunakan grafik scatterplot, titik-titik residual (warna biru) terlihat tersebar acak di sekitar garis nol dan tidak membentuk pola tertentu. Selain itu, sebaran titik tidak melewati batas nilai 500 dan -500. Hal ini menunjukkan bahwa residual relatif sama pada seluruh pengamatan. Oleh sebab itu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas (Napitupulu et al., 2021 : 143)

4. Uji Statistik

a. Uji T

Uji T dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh setiap variabel bebas—yakni PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah—secara individual terhadap variabel terikat, yaitu Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 7 Uji T

Variabel	Coefficient	t-statistic	Prob
C	-438.8129	-19.07521	0.0000
Log_PDRB Per Kapita (X1)	19.81335	24.05855	0.0000

Tingkat Kemiskinan (x2)	-0.064547	-0.0627465	0.5323
Log_Pengeluaran Pemerintah (X3)	1.237689	3.419160	0.0010

Sumber : Data diolah Eviews 13, 2025

- a) Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t-hitung untuk variabel PDRB per kapita (X1) sebesar 24,05855 dengan probabilitas $0,0000 < 0,05$. Karena nilai tersebut lebih besar dari t-tabel sebesar 1,986377, maka PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.
- b) Untuk variabel tingkat kemiskinan (X2), nilai t-hitung sebesar -0,627465 dengan probabilitas $0,5323 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap IPM.
- c) Sedangkan untuk variabel pengeluaran pemerintah (X3), diperoleh nilai t-hitung 3,419160 dengan probabilitas $0,0010 < 0,05$. Artinya, pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Sumatera Barat.

b. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas yakni PDRB per kapita, Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah mempunyai pengaruh secara bersamaan atau simultan terhadap variabel terikat Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 8 Uji F

R-squared	0.997578
Adjusted R-squared	0.996881
S.E. of regression	0.262830
Sum squared resid	5.042800
Log likelihood	4.656820
F-statistic	1431.647
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Data diolah Eviews 13, 2025

Dari Tabel 8 hasil regresi PDRB per kapita, Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sumatera Barat diperoleh nilai F-Statistik sebesar $1431.647 > F\text{-Tabel}$ sebesar 2,70 dan probabilitas $0,000000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB per kapita, Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh

secara simultan dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat

- c. Koefisien Determinasi R²
Koefisien Determinasi (R²) untuk memberikan hasil pengukuran terkait berapa besar proporsi variasi variabel dependen yang dinyatakan oleh variabel independennya pada sebuah model penelitian. Dalam penelitian ini memakai nilai Adjusted R-Squared.

Tabel 9 Uji Koefisien Determinasi R²

R-squared	0.997578
Adjusted R-squared	0.996881
S.E. of regression	0.262830
Sum squared resid	5.042800
Log likelihood	4.656820
F-statistic	1431.647
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Data diolah Eviews 13, 2025

Pada Tabel 9 dapat diketahui nilai koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,996881 menunjukkan bahwa 99,68% variasi perubahan dalam IPM dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan, yaitu PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah. Sementara 0,32% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh PDRB Per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat

Variabel PDRB per kapita mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat. Artinya, peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat mampu meningkatkan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak—yang merupakan tiga dimensi utama pembentuk IPM. Selain itu, kenaikan PDRB per kapita juga memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah, sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk mengalokasikan anggaran ke sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hasil ini sejalan dengan temuan Jesika Damanik et al. (2024) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di wilayah Sumatera.

Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat

Tingkat kemiskinan mempunyai pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin terbatas pula akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang dapat menurunkan kualitas hidup. Namun karena tidak signifikan, dampak statistiknya dianggap lemah, artinya

fluktuasi kemiskinan tidak memberikan perubahan yang berarti terhadap IPM selama periode penelitian. Hasil ini sejalan dengan penelitian Abdullah & Wibowo (2024) dan Ramadhani (2021) yang menemukan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap IPM.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat

Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar alokasi pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik, maka kualitas hidup masyarakat meningkat. Pengeluaran pemerintah yang efektif dan tepat sasaran memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Penelitian ini memperkuat hasil studi Simarmata & Iskandar (2022), yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berperan penting dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan IPM di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data panel terhadap 19 kabupaten dan kota selama periode 2020–2024, penelitian ini menyimpulkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menandakan bahwa peningkatan PDRB per kapita akan mendorong kualitas hidup masyarakat di Provinsi Sumatera Barat melalui peningkatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Sementara itu, tingkat kemiskinan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun kemiskinan dapat menurunkan capaian IPM, pengaruhnya tidak cukup kuat secara statistik dalam penelitian ini. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik, mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga IPM di Provinsi Sumatera Barat turut mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar peningkatan PDRB per kapita dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan perlu diperkuat tidak hanya melalui program bantuan sosial, tetapi juga dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dampaknya lebih berkelanjutan terhadap pembangunan manusia. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Peningkatan IPM harus diiringi dengan strategi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada perluasan akses pendidikan dan kesehatan, tetapi juga peningkatan kualitas layanan sesuai kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan selaras dengan peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah, & Wibowo, M. G. (2024). The effect of human development index (HDI), inequality and consumption on poverty levels in all provinces in Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 9(2), 257–269.

- Ahmat, N. T., Canon, S., Akib, F. H. Y., & Olilingo, F. Z. (2025). Analisis pengaruh belanja daerah bidang pendidikan, kesehatan, dan kemandirian fiskal daerah terhadap indeks pembangunan manusia yang dimoderasi produk domestik regional bruto (PDRB) di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan*, 3(1), 505–516.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Indeks pembangunan manusia 2023. BPS.
- Basuki, T. A. (2021). Analisis data panel dalam penelitian ekonomi dan bisnis (dilengkapi dengan penggunaan EViews). Rajawali Press.
- Hardani, Auliya, H. N., Andriani, H., Fardani, A. R., Ustiawaty, J., Utami, F. E., Sukmana, J. D., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.
- Imantria, B., & Kurnia, A. S. (2024). Does local government expenditure lead to human development in Indonesia? *Economics Development Analysis Journal*, 13(2), 235–247.
- Jesika, J., Damanik, S., Siregar, H. M., Aruan, N. I. M., & Suharianto, J. (2024). Pengaruh belanja modal, PDRB, dan PMDN terhadap IPM provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017–2023. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11), 482–493.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (2020). *Public finance in theory and practice*. McGraw-Hill.
- Nasution, R. A., Fauzi, F., Harahap, I., & Anggara, W. (2025). The role of education in human resource development in the context of economic development: A review. *Jurnal INSIS*.
- Nuraini, L., Hidayat, T., & Fadilah, A. (2023). Pembangunan manusia berbasis kesejahteraan sosial dan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora*, 12(1), 45–56.
- Rahayu, I., Sari, N. P., & Gunawan, A. (2022). Analisis indeks pembangunan manusia sebagai cerminan kesejahteraan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 78–88.
- Ramadhani, W. (2021). Analysis of the effect of human development index on economic growth, poverty and investment in Riau Province. *Tamansiswa Management Journal International*, 2775-166X.
- Ravallion, M. (2020). *Poverty: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Simarmata, Y. W., & Iskandar, D. D. (2022). Pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, jumlah penduduk, kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia: Analisa two stage least square untuk kasus Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 78–94.
- Suparmoko, M. (2020). *Ekonomi publik: Untuk keuangan dan pembangunan daerah*. BPFE-Yogyakarta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson Education.